

Dewan Sepakat Bentuk Pansus Aset

Yulan Mirza
BorneoTribune, Pontianak

Rabu, 28 September 2011

Borneo Tribune

DPRD Provinsi Kalbar sudah sepakat untuk membentuk panitia khusus (pansus) menyelusuri keberadaan dan status aset yang berpengaruh terhadap hasil penilaian BPK atas pengelolaan keuangan pemrov Kalbar.

Sementara pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalbar masih terus merampungkan audit aset lanjutan atas permintaan pemerintah provinsi Kalbar.

Ketua Komisi A DPRD Kalbar, H Retno Pramudya, SH, MH menguraikan usulan pembentukan pansus aset yang disampaikan pihak beberapa bulan lalu sudah dan ditandatangani 21 anggota Dewan segera terbentuk.

"Usulan itu sudah disepakati dan segera dijadwalkan Badan Musyawarah DPRD untuk dilaksanakan paripurna pembentukan Pansus Aset. Kesepakatan itu setelah ada rapat koordinasi antara unsur pimpinan dewan dan pimpinan fraksi," terangnya.

Menurut legislator PPP ini persoalan aset ini, harus focus. Seperti mengenai jumlah dan besaran, status hukum, jenis, dan kontribusi terhadap PAD serta kondisi riil antara data dengan yang ada di lapangan. Sehingga penanganan aset ini bisa terlaksana dengan baik, semua aset milik pemerintah provinsi terdata dan jelas keberadaan dan pemanfaatannya.

Legislative Sekadau-Sanggau ini juga optimis BPK dapat membantu pemerintah daerah dalam menyelesaikan permasalahan aset yang menjadi masalah umum. Khususnya di provinsi. Kemudian hasil pemeriksaan itu dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan berikutnya.

"Pansus ini untuk mendorong pemerintah provinsi dalam menyelesaikan permasalahan aset. Kita berkomitmen untuk dapat mencapai penyelesaian dengan sebaik-baiknya dan secepatnya," tegas dia.

Retno menambahkan selama belum adanya perbaikan signifikan dan memadai dalam sistem penataan dan pengelolaan aset barang milik Pemrov Kalbar. Sehingga, tak heran penilaian laporan keuangan akan sulit diyakini kewajarannya.

Hal itu dapat dilihat dari hasil pemeriksaan BPK RI terhadap laporan keuangan Pemrov. Kalbar APBD 2010 pada paripurna di Gedung DPRD Kalbar, Kamis (21/7) lalu.

Hasilnya, lanjutnya, banyak aset pemrov yang tidak dapat diyakini kewajarannya. Hal-hal yang tak wajar mengenai aset itu meliputi tanah, gedung dan bangunan, jalan, jaringan, instalasi, peralatan, mesin dan aset tetap lainnya.

"Terdapat perbedaan saldo aset tetap antara neraca Pemprov dengan buku inventaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) selisih perbedaannya sebesar Rp 71,3 miliar. Hal ini membuktikan tidak seriusnya Gubernur beserta para pembantunya dalam menatausahakan dan mengelola barang milik daerah. Selain itu tidak patuhnya pada peraturan perundang-undangan," paparnya. □